

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM
MEMBANGUN FASILITAS PENDIDIKA
(STUDI KASUS KECAMATAN TAMPAN 2010)**

Oleh :

**Fredy Wanto LG
Muhamad Ridwan**

fredywantomarbun@yahoo.co.id

Abstract

Education is a major key in establishing and promoting a nation. Education is important because it is an investment to transform one's life towards the better. Education is as a benchmark in the Create HR (human resources) a quality that is able to compete in the current era of globalization. To realize all that, then these must be improved education ranging from educational facilities to qualified teachers. Means of education facilities is spread evenly is one effort that can be done now so that the kids can get their due in meeting the needs of his education. This research aims to find out why the education facilities in Tampan are not scattered evenly (a case study of sub-district Tampan 2010). The methods used in this research are using qualitative analysis or approach. Types and sources of data obtained from primary data sourced from informant research and secondary data sourced from books that deal with the issue and title research. When the data in this research done in observation and interview directly against an object research in depth with informer understand and know about the observation. Based on findings field why facilities education in sub-district Tampan not widespread evenly are as problem difficulty of finding land used to build schools and expensive price of land offered by people to municipal pekanbaru of compensation land.

Keywords: *Policy, The Goverment Of Pekanbaru, Developments, Educational Facilities*

A.Latar Belakang Masalah

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2010

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Rasi
1	Tampan	86.445	83.237	169.682	1,03
2	Payung Sekaki	43.881	42.724	86.605	1,03
3	Bukit Raya	47.241	44.690	91.913	1,09
4	Marpoyan Damai	64.618	61.086	125.704	1,06
5	Tanayan Raya	62.979	60.178	123.157	1,05
6	Lima Puluh	20.380	20.965	41.345	0,96
7	Sail	10.603	10.838	21.441	0,97
8	Pekanbaru Kota	12.581	12.482	25.063	1,01
9	Sukajadi	23.218	23.983	47.201	0,96
10	Senapelan	17.904	18.535	36.439	0,95
11	Rumbai	33.559	31.073	64.632	1,08
12	Rumbai Pesisir	33.110	31.707	64.817	1,04
	Jumlah	456.519	441.498	898.017	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru.

Tabel 1.2 Jumlah Sekolah Di Kota Pekanbaru Tahun 2010 Per Kecamatan

NO	KECAMATAN	SD	SMP	SMA	SMK	JUMLAH
1	PEKANBARU KOTA	3	-	-	-	3
2	SENAPELAN	17	3	1	-	21
3	LIMAPULUH	17	6	2	1	26
4	SUKAJADI	20	4	-	-	24
5	SAIL	7	1	1	2	11
6	RUMBAI	14	4	2	1	21
7	TAMPAN	15	2	1	1	19
8	BUKIT RAYA	16	2	1	-	19
9	MARPOYAN DAMAI	18	4	2	-	24
10	TENAYAN RAYA	27	4	3	1	35
11	PAYUNG SEKAKI	11	2	1	-	14
12	RUMBAI PESISIR	21	4	-	1	26
	Jumlah	186	36	14	7	243

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa fasilitas pendidikan dikota pekanbaru tidak tersebar secara merata. Terutama sekolah negeri yang banyak ditemukan dikecamatan Tenayan Raya dengan jumlah 27 buah untuk Tingkat SD, disusul oleh kecamatan Rumabi dan Sukajadi masing-masing berjumlah20, sedangkan untuk Tingkat SMP sekolah negeri banyak ditemukan dikecamatan Lima Puluh berjumlah enam buah, sedangkan untuk tingkat SMA berada dikecamatan Tenayan Raya, Sail, Sukajadi dengan rata-rata berjumlah 3 buah, dan untuk Tingkat SMK berada dikecamatan Sail dengan jumlah dua buah.

B.Rumusan Masalah

1. Mengapa fasilitas pendidikan dikecamatan Tampan tidak tersebar secara merata ?
2. Apa saja faktor- faktor yang mempengaruhi fasilitas pendidikan di kecamatan Tampan tidak merata?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap Penelitian yang di lakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang hendak akan dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

Untuk mengetahui mengapa fasilitas pendidikan di kecamatan Tampan tidak tersebar secara merata dan Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang menjadi kendala atau hambatan sehingga menyebabkan persebaran fasilitas pendidikan di kecamatan Tampan tidak tersebar merata.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian secara lebih lanjut, terutama dalam meneliti yang berkaitan dengan Mengapa fasilitas pendidikan di kecamatan Tampan tidak tersebar secara merata.

D. Kerangka Teori

1. Kebijakan Pemerintah

Farid Ali (2010:2) dalam studi kebijakan Pemerintah menguraikan definisi kebijakan secara rinci. Ia mengungkapkan kebijakan sebagai kebijakan studi diartikan sebagai pernyataan kehendak yang diikuti oleh unsurpaksaan dan pengaturan, sehingga dalam pelaksanaannya akan mendapat tujuan yang hendak dikehendaki.

2. Pembangunan

(Menurut Riyadi dan Deddy Bratakusumah 2005:2) Pembangunan adalah proses melakukan perubahan. Dalam konteks fisik, pembangunan adalah mewujudkan sesuatu yang semula tidak ada menjadi ada. Sebuah pembangunan tidak terlepas dari beberapa tahapan.

Berdasarkan Undang- undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional,

rangkaian pengelolaan keuangan terdiri dari tiga tahap:

- 1). Perencanaan
- 2). Pelaksanaan
- 3). Pertanggungjawaban.

3. Anggaran

(Menurut Sony Yuwono , Tengku Agus Indrajaya dan Haryandi 2005:27) Anggaran adalah suru rencana terperinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang (perencanaan keuangan) untuk menunjukan perolehan dan penggunaan sumber-sumber organisasi. Sebagai instrumen ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, khususnya kecamatan Tampan. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan karena Kecamatan Tampan merupakan penduduk terpadat tahun 2010 berdasarkan sensus penduduk 2010 kemarin.

2. Informan

Dalam menentukan informan ini penulis melakukan dengan cara menggunakan *purposive sampling*, yaitu pengambilan informan dengan memilih unsur-unsur tertentu saja yang dianggap penting dan yang benar-benar memahami tentang bagaimana kebijakan pemerintah dalam membangun fasilitas pendidikan di kawasan padat. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Informan Penelitian

No	Informan	Nama	Jumlah
1	Kepala Dinas Pendidikan	Prof.Dr.Zulfadil	1
2	Mantan Kadisdik Kota Pekanbaru	Drs.Yuzamri Yakub	1
3	Kepala Bappeda Kota Pekanbaru	Drs. Syofian	1
4	Anggota DPRD Kota Pekanbaru	Drs. Aprizal DS Ade Hartati M.Pd	2
5	Camat Tampan	Irma Novitra S.Sos	1
6	Ketua LPM	Yasman	1
7	Tokoh Masyarakat	Khairuddin	1
		Jumlah	8

Sumber : Data Olahan lapangan 2013

3. Jenis Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan penelitian, yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa informasi dari wawancara.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi-dokumentasi atau keterangan sumber-sumber lainnya yang dapat menunjang objek yang sedang diteliti, seperti dokumentasi, arsip, dan keterangan-keterangan lain lain yang berhubungan dengan masalah penelitian yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan terpercaya, dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi kepada informan pada obyek penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi dari informan atau orang yang dianggap mengetahui tentang permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian.

b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mengumpulkan data dari segala sumber data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data yang berbentuk tertulis Teknik pengambilan data secara tertulis bersumber pada catatan-catatan,

arsip-arsip, gambar atau foto yang ada di lokasi penelitian yang berkaitan dengan penelitian dan bertujuan untuk memperjelas dan mendukung proses penelitian.

5. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan analisa kualitatif, jenis penelitian ini dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. (Suyanto, 2010:166)

PEMBAHASAN

KEBIJAKAN PEMERITAH KOTA PEKANBARU DALAM MEMBANGUN FASILITAS PENDIDIKAN (STUDI KASUS KECAMATAN TAMPAN 2010)

Handayanigrat menyatakan ada tujuh (7) indikator yang dapat digunakan dalam melihat dan merencanakan suatu pembangunan diantaranya adalah tujuan, strategi, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, partisipasi masyarakat, rencana proyek. Pembangunan yang dimaksud adalah dalam bidang sarana fasilitas pendidikan.

1. Tujuan

Dalam hal ini tujuan atau sasaran ataupun target yang dimaksud adalah terjadinya pemerataan fasilitas pendidikan secara merata, disamping itu agar kebutuhan pendidikan dapat tercapai secara merata.

Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Dinas pendidikan Prof. DR. Zulfadil SE MBA beliau mengatakan tujuan pemerataan fasilitas pendidikan:

“.... tujuan pemerataan fasilitas pendidikan adalah agar setiap anak dapat memperoleh pendidikan tanpa terkecuali, dan setiap anak dapat ditampung terutama untuk daerah yang sudah melebihi kapasitas jumlah penduduk dengan fasilitas sekolah yang tersedia....” (wawancara ,13 Mei 2013, pukul 10.30 wib).

2. Strategi

Tabel 3.1 Rencana Strategis Dinas Pendidikan Dalam Membangun Fasilitas Pendidikan

Rencana Jangka Panjang	Rencana Jangka Menengah	Rencana Jangka Pendek
SD	SMP	SMA
Tiga (3) per kelurahan	Satu (1) per kelurahan	Satu (1) per kelurahan

Sumber : Data Olahan Lapangan 2013

3.Kebijaksanaan

Sebagai unsur teknis dari pelaksana dan mengetahui permasalahan di lapangan , maka penulis mencoba bertanya dengan kepala Dinas pendidikan mengenai usulan pembangunan sekolah yang kurang tersebut, dan berikut penjelasannya:

“..iya memang betul untuk kecamatan Tampan akan di lakukan pembangunan sekolah baik itu tingkat SD,SMP dan SMA , itu di lakukan karena jumlah sekolah yang tersedia tidak mampu lagi menampung anak –anak, sehingga kita (Dinas Pendidikan) mengusulkan agar pemerintah menambah fasilitas sekolah mengingat jumlah sekolah disana pun masih sedikit bila kita bandingkan dengan jumlah murid yang bersekolah...” (wawancara, 13 Mei 2013 pukul 11.15)

4.Prosedur

Berkaitan dengan hal ini, Bapak Khairuddin selaku tokoh masyarakat kelurahan sidumulyo barat mengutarakan pendapatnya yang menyatakan: *“...Dalam perencanaan pembangunan, khususnya masalah fasilitas pendidikan yang masih kurang, sumbangsih nyata bagi kami hanyalah dengan menyampaikan lewat forum ini saja, tentunya kami berharap agar ini tidak diam sampai tingkat kecamatan saja, dan kami berharap ini dibahas lagi dalam musrenbang tingkat kota agar pemerintah memperhatikan masalah ini dan permasalahan fasilitas pendidikan dapat segera diperhatikan dengan serius...”*. (wawancara, 11 Mei 2013 pukul 10.00 wib)

5. Anggaran

Dalam penelitian ini, penulis bertanya dengan DPRD Kota Pekanbaru Ade Hartati M.Pd mengenai anggaran untuk pendidikan, dari komisi tiga dan berikut petikan wawancaranya: *“...Untuk anggaran pendidikan kami (DPRD) sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar yakni sebesar 30 % dari APBD pemerintah kota pekanbaru, bahkan kami sudah melampaui dari anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah itu tentu saja perhatian kami (DPRD) dalam dunia pendidikan jauh lebih baik...”* (wawancara, 22 Mei 2013 pukul 11.00 wib)

6. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dapat di artikan sebagai peran aktif dalam mempengaruhi proses pembangunan serta secara bersama- sama mengambil manfaat dari kegiatan yang akan di lakukan, atau dapat di katakan partisipasi sebagai keterlibatan aktif masyarakat di dalam menyampaikan pendapat atau pemikirannya kepada pemerintah (pemangku kepentingan). Seperti yang di jelaskan oleh ketua LPM Yasman tentang partisipasi masyarakat dalam menyampaikan masalah kurangnya fasilitas pendidikan:

“ ...Sejauh ini masalah sudah kita sampaikan baik dalam forum diskusi oleh seluruh tokoh masyarakat, maupun dalam acara musrenbang, dan saya melihat partisipasi masyarakat di Kecamatan Tampan untuk menyampaikan permasalahan ini cukup besar di mana dalam acara musrenbang kemarin masalah ini merupakan masalah yang paling hangat untuk di bahas agar penambahan sekolah dan pembangunan sekolah dapat tercapai mengingat jumlah sekolah yang masih sedikit...” (wawancara,18 Mei 2013 pukul 10.40 wib)

7. Rencana Proyek

Rencana Proyek adalah perpaduan dari tujuan, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan unsur lain yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Tabel 3.4 Sekolah yang akan dibangun untuk memenuhi pendidikan dikecamatan Tampan.

No	Tingkat SD	Tingkat SMP	Tingkat SMA
1	Jalan Purwodadi Kelurahan sidumuyo barat	Jalan Garuda Sakti Kelurahan Simpang baru	Jalan Suka Karya Kelurahan Tuah Karya
2	Jalan Garuda Sakti KelurahaSimpang baru		
3	Jalan Suka Karya kelurahan Tuah Karya		

Sumber: Data olahan lapangan 2013

FAKTOR- FAKTOR KENDALA DALAM PEMBANGUNAN FASILITAS PENDIDIKAN DI KECAMATAN TAMPAN

1.Sulit Mencari Lahan

Seperti yang dikatakan oleh Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Drs. Yuzamri Yakub beliau mengatakan:

“...permasalahan lahan merupakan salah satu alasan yang menjadi kendala yang dihadapi dinas pendidikan didalam membangun sekolah dikecamatan Tampan, menurut beliau dalam membangun sebuah sekolah tentulah memerlukan lahan yang cukup luas, dan itu sangat sulit kita temukan disini (kecamatan Tampan)...” (wawancara, 17Mei 2013, pukul 10.00 wib)

Tabel3.5 Luas Lahan Yang Dibutuhkan Dalam Membangun Sekolah

Tingkat	Luas lahan yang dibutuhkan
SD	3500 Meter
SMP	5.000 Meter
SMA	10.000 Meter / 1HA

Sumber : Data Olahan Lapangan 2013

2.Harga Lahan Yang Tinggi

Selain sulitnya mencari lahan, faktor-faktor yang turut mempengaruhi mengapa fasilitas pendidikan di kecamatan Tampan tidak tersebar secara merata adalah faktor harga lahan yang cukup mahal.

Seperti yang dikatakan Mantan Kepala Dinas Pendidikan Drs. Yuzamri Yakub beliau mengatakan :*“...memang tidak bisa dipungkiri selain sulitnya mencari lahan, permasalahan lain yang turut mendorong mengapa fasilitas pendidikan di kecamatan Tampan mengapa fasilitas pendidikan di kecamatan Tampan adalah harga lahan yang cukup mahal, lebih lanjut beliau mengatakan kalau berbicara dengan harga lahan masyarakat Tampan menawarkan sesuai dengan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak)...“*(wawancara,17Mei 2013,pukul 10.15 wib)

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya terutama uraian Pada bab hasil penelitian dan pembahasan, dikaitkan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dapat ditarik beberapa Kesimpulan pokok sebagai berikut:

1. Kondisi distribusi fasilitas pendidikan Tampan yang tidak merata antar kecamatan mengakibatkan tidak meratanya layanan pendidikan yang diterima oleh masyarakat, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut agar didapatkan arahan yang sesuai agar pemerataan fasilitas pendidikan di kecamatan Tampan segera dapat teratasi. Upaya pemerataan layanan pendidikan di kecamatan Tampan hendaknya dengan memperhatikan kondisi masing-masing wilayah. Hal ini di karenakan kebutuhan pemerataan layanan pendidikan berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pendidikan. Untuk itu sangat di perlukan suatu upaya pemenuhan kebutuhan fasilitas pendidikan yakni dengan melalui partisipasi masyarakat agar fasilitas pendidikan di kecamatan Tampan segera tercapai dan terpenuhi.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Agar secepatnya pembangunan sekolah dapat dilaksanakan mengingat kebutuhan akan memperoleh pendidikan di kecamatan Tampan sangat tinggi, untuk itu perlu komitmen pemerintah agar permasalahan ini segera diatasi dengan serius. Dan untuk masalah harga lahan hendaknya pemerintah beserta masyarakat untuk duduk bersama dan mendiskusikan agar tercapai kesepakatan. Perlu kerjasama dengan semua stakeholders agar permasalahan pembangunan pendidikan yang kurang tersebut segera dapat diatasi, dan dengan demikian kendala – kendala yang menjadi hambatan dalam pembangunan sekolah nantinya dapat diselesaikan. Sebagai unsur teknis yang membidangi pendidikan hendaknya lebih bersemangat lagi agar tercapai apa yang dikatakan sebagai pemerataan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta:MedPress.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama:Jakarta.
- Dunn, William.N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*.Gadjah Mada University Press:Yogyakarta
- Farid, Ali,2010. Studi Tentang Kebijakan pemerintahan, Makasar: BDF Bripadi Press
- Jhon W.Cress Well. 2010. Reserch Design. Pustaka Pelajar: Yongyakarta
- Kuncoro, M.2007. Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang: Erlangga. Jakarta, Edisi ke -2
- Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah. PT.Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Riant ,Nugroho,2003, *Kebijakan Pemerintahan public*, Jakarta : PT.elex media komputindo.
- Surya, Pratama. 2012. Pemetaan Pendidikan (Education Mapping) Sebagai Dasar Meningkatkan Layanan Pendidikan, Makalah ICEMAL, 4-5 Juli 2012: Malang
- Soekidjo Notoadmodjo.2003.pendidikan dan perilaku. Jakarta:PT. Rineka Cipta.Suyanto, Bagong. 2010. *Metode Penelitian Sosial*.Kencana:Jakarta
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik Untuk Pemimpin Berwawasan Internasional*. Balairung & co:Yogyakarta.
- Widjaja,HAW. 1998. *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tk II*.Rajawali Pers.Jakarta

Peraturan perundang- undangan

- UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
- UU No.25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
- Perda No.19 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pekanbaru

Sumber lainnya

- Skripsi /Agus Susanto / *Politik Anggaran Pemerintah Provinsi Riau pada kontroversi Pembangunan Tugu Zapin dikota Pekanbaru/ 2011.*
- Skripsi / Hastuty Purba / *Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) dikota Pekanbaru tahun 2011*
- Skripsi / Jacklin Soltan Hasibuan/ *Perencanaan Pembangunan Kota Balige oleh Bappeda Kota Toba Samosir / 2012*